



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP - TAHUN 2025)



**JL. TULIP NO. 3 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21164 FAX. (0728) 21164
KODE POS 34811**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data, namun diharapkan laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Bara dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada umumnya, dan semoga di tahun yang akan datang capaian kinerjanya dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuandan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Bara ini.

Liwa, Februari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Muhammad FAISAL, S.H., M.H.
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730912 199903 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 maka yang menjadi indikator tujuan dan indikator sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu :

- a. Tujuan : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.
Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.
Target Kinerja : 84.20 poin (Sangat Baik)

- b. Sasaran :
 - 1. Menurunnya Konflik SARA
Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Konflik SARA.
Target Kinerja : 100%

2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

Teget Kinerja : 86%

2. Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan LSM yang Terdata

Teget Kinerja : 5,26%.

Dari seluruh indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan pada tahun 2025, telah dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut :

a. Capaian kinerja pada indikator tujuan strategis yang menjadi sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2025	
				TARGET	REALISASI
1	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	89,58 Poin (Sangat Tinggi)	90,50 Poin (Sangat Tinggi)	84,20 Poin (Sangat Tinggi)	91,15 Poin (Sangat Tinggi)

b. Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah.

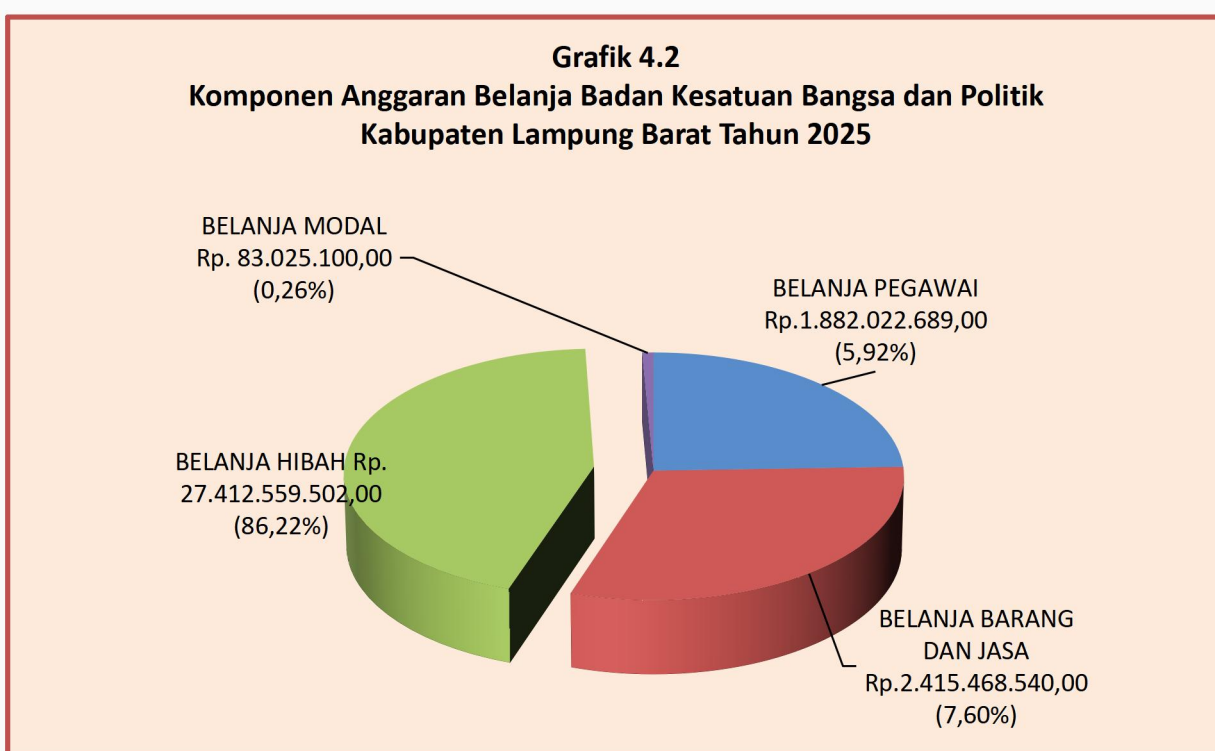
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	
				TARGET	REALISASI
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	-	85%	79.5%
		Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	6.42%	5.54%	6.99%

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah dengan cara menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana untuk kegiatan yang prioritas merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM,

sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, dengan pagu anggaran belanja sebesar Rp. 7.564.181.175,00 yang terdiri atas komponen-komponen pos belanja antara lain Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.853.573.369,00 atau 24,50%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.316.161.518,00 atau 30,62%, belanja hibah sebesar Rp. 3.330.160.667,00 atau 44,12% dan belanja modal sebesar Rp. 57.075.100,00 atau sebesar 0,75% dimana sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 7.370.172.139,00 atau sebesar 97,44%.



Demikian disampaikan LKjIP tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Peran Strategis Perangkat Daerah.....	5
D. Isu Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	8
1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	9
2. Program dan Kegiatan Pembangunan.....	10
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	17
C. Target Kinerja Tahun 2025.....	19
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
A. Analisis Sumber Daya Manusia.....	29
B. Analisis Sarana dan Prasarana.....	32
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.....	35
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Tindak Lanjut LHEI 2025.....	39
B. Capaian Kinerja.....	40
C. Realisasi Anggaran.....	60
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	63
E. Perbandingan Kinerja.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	66

C. Permasalahan.....	67
D. Rekomendasi.....	67

DAFTAR TABEL

1. <i>Tabel 1.1 Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023.....</i>	4
2. <i>Tabel 2.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....</i>	11
3. <i>Tabel 2.2 Perjanjian kinerja tahun 2025 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat denganPenjabat Bupati Lampung Barat.....</i>	14
4. <i>Tabel 2.3. Target dan Realisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025....</i>	16
5. <i>Tabel 2.4. Target Kinerja Utama Tahun 2025.....</i>	19
6. <i>Tabel 2.4. Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....</i>	20
7. <i>Tabel 3.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2025.....</i>	29
8. <i>Tabel 3.2. Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....</i>	31
9. <i>Tabel 3.3. Daftar Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.....</i>	32
10. <i>Tabel 3.4. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....</i>	35
11. <i>Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....</i>	39
12. <i>Tabel 4.2. Daftar Bantuan Keuangan Paratai Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....</i>	56
13. <i>Tabel 4.3. Hibah Uang Untuk Keperluan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat.....</i>	57
14. <i>Tabel 4.4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Lampung Barat pada Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2025.....</i>	59
15. <i>Tabel 4.5. Hibah Uang Kepada Ormas/LSM Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat</i>	64
16. <i>Tabel 4.6. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....</i>	70

DAFTAR GRAFIK

1	<i>Grafik 3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....</i>	28
2	<i>Grafik 3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....</i>	29
3	<i>Grafik 3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....</i>	30
4	<i>Grafik 3.4. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.</i>	30
5	<i>Grafik 4.1. Komponen Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....</i>	69

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar IV.1. Peta Proses Bisnis Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.....	40
2. Gambar IV.2. Peta Proses Bisnis Pemebentukan dan Pelatihan Paskibraka.....	42
3. Gambar IV.3. Peta Proses Bisnis Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.....	45
4. Gambar IV.4. Peta Proses Bisnis Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik.....	48
5. Gambar IV.5. Peta Proses Bisnis Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik.....	58
6. Gambar IV.6. Peta Proses Bisnis Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan nasional, serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondusifitas daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat terus berupaya meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek, terutama dalam perumusan kebijakan, koordinasi antar-lembaga, serta fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, ketahanan masyarakat, dan partisipasi politik.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen evaluasi capaian kinerja selama satu tahun anggaran. LKjIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, pencapaian indikator kinerja utama (IKU), serta kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat terkait capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi instansi dalam upaya

meningkatkan kinerja dan kualitas layanan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta terciptanya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik di Kabupaten Lampung Barat.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Adapun tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan, dekonsentrasi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelayanan administratif; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat daerah dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Tabel 1.1
BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023)



C. Peran Strategis Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok-kelompok strategis lainnya.

Dalam konteks stabilitas politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam membangun komunikasi politik yang harmonis antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat guna menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi dialog antar-stakeholder, pengawasan terhadap dinamika politik lokal, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dan demokratis dalam proses pemerintahan.

Dibidang wawasan kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat. Melalui program pembinaan ideologi Pancasila, penguatan ketahanan masyarakat, serta penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, Bakesbangpol berupaya memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam.

Selain itu, dalam aspek ketahanan nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas untuk mengidentifikasi potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Dengan melakukan pemetaan sosial serta analisis situasi politik dan keamanan, Bakesbangpol dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat kepada pemerintah daerah guna mengantisipasi dan menangani potensi konflik sosial di masyarakat.

Bakesbangpol juga berperan dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan guna mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah. Melalui pembinaan dan penguatan kelembagaan organisasi, masyarakat, diharapkan tercipta

sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

Dengan berbagai peran strategis tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menciptakan daerah yang aman, damai, dan harmonis guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

D. Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal serta permasalahan yang berpotensi akan dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan

dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan instrumen perencana dan alat kendali serta tolak ukur dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat agar lebih terarah dan terjamin demi tercapainya sasaran pembangunan selama empat tahun dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat Lampung Barat kedepan sebagai bangsa Indonesia yang dinamis dan tantangan yang dihadapi serta perubahan lingkungan secara global.

Renstra 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, mengacu pada RPD tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan setrategis yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.
- Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Target Kinerja : - Tahun 2023 : Sangat Baik (84.10 poin)
- Tahun 2024 : Sangat Baik (84.15 poin)
- Tahun 2025 : Sangat Baik (84.20 poin)
- Tahun 2026 : Sangat Baik (84.25 poin)

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” yaitu :

- Sasaran I : Menurunnya Konflik SARA
- Indikator Sasaran : Persentase Pengurangan Konflik SARA
- Teget Kinerja : 100%

Sasaran II : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

Teget Kinerja : 86%

2. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah.

Teget Kinerja : 5.54%.

Dengan adanya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 maka hal tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dengan memperhatikan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, berikut ini telah dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila melalui pemanfaatan teknologi dan media digital.
2. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat.
3. Memperkuat kohesivitas masyarakat melalui pengelolaan kerukunan warga.
4. Melakukan sosialisasi Gerakan Hidup Rukun.
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas.
6. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kabupaten Lampung Barat.
7. Memperkuat kesadaran generasi muda untuk meningkatkan pemahaman demokrasi.

8. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi dengan melibatkan peran serta partai politik.

Begitu pula untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis tahun 2023-2026 tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar-umat beragama.
2. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan.
3. Pendidikan, pembinaan nilai-nilai pancasila.
4. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai dan implementasi rasa cinta tanah air.
6. Meningkatkan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
7. Memperkuat koordinasi antar lembaga melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
- 9 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan social.
- 10 Pendidikan, Pembinaan, Pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
- 11 Meningkatkan Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat.
12. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya;
13. Memperkuat citra positif institusi dan kelembagaan politik;

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

rencana pembangunan daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengkomodir kebijakan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penerangkat daerah, maka pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 7.564.181.175,00 (*Tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta serratus delapan puluh satu ribu serratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran pada berakhirnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.370.172.139,00 (*Tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu serratus tiga puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 97,44% yang teralokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU APBD MURNI 2025	PAGU APBD PERUBAHAN 2025	REALISASI	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2,312,340,296,00	2,255,498,469,00	2,125,328,187	94.23%
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10,854,000,00	25,918,000,00	25,430,000,00	98.12%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,806,000,00	3.884.000,00	4.024.000,00	99.75%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,436,000,00	1,436,000,00	1,436,000,00	100%
1.1.3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	912,000,00	912,000,00	912,000,00	100%
1.1.4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	100%
1.1.5	Koordinasi Dan Penyusunan	877,000,00	877,000,00	877,000,00	100%

	Perubahan DPA-SKPD				
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100%
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,043,000,00	3,043,000,00	2,719,000,00	89,35%
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	2,044,158,196,00	1,857,332,369,00	1,751,122,568,00	94,28%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,040,399,196,00	1,853,573,369,00	1,747,363,568,00	94,27%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1,339,000,00	1,339,000,00	1,339,000,00	100%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD	1,066,000,00	1,066,000,00	1,066,000,00	100%
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,354,000,00	1,354,000,00	1,354,000,00	100%
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.234.000,00	1,399,000,00	1,399,000,00	100%
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,399,000,00	1,399,000,00	1,399,000,00	100%
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,273,000,00	20,273,000,00	5,581,000,00	27,53%
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6,273,000,00	6,273,000,00	5,581,000,00	88,97%
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000,00	14.000.000,00		0%
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,079,800,00	113,399,800,00	112,993,300,00	99,64%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	2,410,800,00	2,410,800,00	2,410,800,00	100%

1.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,750,000,00	7,750,000,00	7,750,000,00	100%
1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,020,000,00	7,020,000,00	7,020,000,00	100%
1.5.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	6,174,000,00	6,174,000,00	6,174,000,00	100%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,725,000,00	90,045,000,00	89,638,500,00	99,55%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,800,000,00	46,800,000,00	46,402,800,00	99,15%
1.6.1	Pengadaan Mebel	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100%
1.6.2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	0	42,000,000,00	41,602,800,00	99,05%
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,711,700,00	63,311,700,00	57,697,709,00	91,13%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00	100%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19,920,000,00	19,920,000,00	14,356,009,00	72,07%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,791,700,00	41,391,700,00	41,341,700,00	99,88%
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,064,600,00	127,064,600,00	124,701,810,00	98,14%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,775,000,00	75,775,000,00	74,287,210,00	98,04%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,414,600,00	7,414,600,00	7,414,600,00	100%
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43,875,000,00	43,875,000,00	43,000,000,00	98,01%
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	947,443,918,00	1,347,607,918,00	1,342,667,260,00	99,63%

2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	947,443,918,00	1,347,607,918,00	1,342,667,260,00	99,63%
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40,275,300,00	40,275,300,00	39,003,300,00	96,84%
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	27,418,300,00	27,418,300,00	26,458,200,00	96,50%
2.1.3	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan Dan Purnapaskibraka	181,976,000,00	573,640,000,00	572,772,780,00	99,85%
2.1.4	Pembentukan Paskibraka	697,774,318,00	706,274,318,00	704,432,980,00	99,74%
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	792,341,253,00	792,341,253,00	790,895,803,00	99,82%
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik	792,341,253,00	792,341,253,00	790,895,803,00	99,82%
3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan	78,176,000,00	78,176,000,00	77,547,850,00	99,20%

	Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi di Daerah	714,165,253,00	714,165,253,00	713,347,953,00	99,89%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	332,273,000,00	437,766,000,00	436,806,000,00	99,78%
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	332,273,000,00	437,766,000,00	436,806,000,00	99,78%
4.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18,540,000,00	18,540,000,00	18,204,000,00	98,19%
4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	306,273,000,00	366,273,000,00	365,841,000,00	99,88%
4.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7,460,000,00	52,953,000,00	52,761,000,00	99,64%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN	230,368,600,00	230,368,600,00	228,284,050,00	99,10%

	PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	230,368,600,00	230,368,600,00	228,284,050,00	99.10%
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	97,824,800,00	97,824,800,00	96,682,900,00	98,83%
5.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	59,805,200,00	59,805,200,00	59,387,550,00	99,30%
5.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72,738,600,00	72,738,600,00	72,213,600,00	99,28%
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,269,454,935,00	2,500,598,935,00	2,446,190,839,00	97.82%
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,269,454,935,00	2,500,598,935,00	2,446,190,839,00	97.82%
6.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	42,966,800,00	42,966,800,00	38,882,350,00	90,49%

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
6.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	102,311,000,00	102,311,000,00	100,592,925,00	98,32%
6.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2,124,177,135,00	2,355,321,135,00	2,306,715,564,00	97,94%
JUMLAH		6,884,222,002,00	7,564,181,175,00	7,370,172,139,00	97,44%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Bupati Lampung Barat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam sasaran program, kegiatan dan subkegiatan yang memiliki korelasi berupa turunan dari target Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi perangkat daerah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja utama dan program yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :

Tabel 2.2
Perjanjian kinerja tahun 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Dengan Penjabat Bupati Lampung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase potensi konflik SARA tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat	100.00%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	0.00%
		Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,54%

Sumber data : IKU 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan DPA-APBD Murni Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 6.884.222.002,00 yang dialokasikan

untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.040.399.196,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.784.720.518,00, belanja Hibah sebesar Rp. 3.046.227.188,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 12.875.100,00, selanjutnya pada DPA-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat melakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 7.564.181.175,00 dengan komponen perubahan alokasi menjadi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.853.573.369,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.316.161.518,00, Belanja Hibah sebesar Rp. 3.337.371.188,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 57.075.100,00.

Perubahan anggaran dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan pada tahun 2025 ini guna menunjang pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

- a. Perubahan anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

Perubahan penambahan anggaran pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- b. Perubahan anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Lembaga Dan Ormas Aktif Dalam Ketahanan Sosial Dan Kemasyarakatan.

Adapun kerangka pendanaan secara terperinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Target dan Realisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU USULAN RENJA 2025	PAGU PPAS 2025	PAGU APBD MURNI 2025	PAGU APBD PERUBAHAN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2,263,292,254	1,990,746,000	2,312,340,296	2,255,498,469	
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	39,855,000	24,855,800	10,854,000,00	25,918,000,00	
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	1,673,927,654	1,650,568,700	2,044,158,196,00	1,857,332,369,00	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,234,000	11,234,000	11.234.000,00	1,399,000,00	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26,872,000	26,872,000	20,273,000,00	20,273,000,00	
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	145,522,800	99,259,600	60,079,800,00	113,399,800,00	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145,520,000	55,500,000	4,800,000,00	46,800,000,00	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,829,800	75,809,900	58,711,700,00	63,311,700,00	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,531,000	60,646,000	112,064,600,00	127,064,600,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,205,313,636	1,011,884,840	947,443,918,00	1,347,607,918,00	
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,205,313,636	1,011,884,840	947,443,918,00	1,347,607,918,00	



1	2	3	4	5	6	7
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	23,871,087,229	23,380,475,729	792,341,253,00	792,341,253,00	
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik	23,871,087,229	23,380,475,729	792,341,253,00	792,341,253,00	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	483,053,000	377,042,000	332,273,000,00	437,766,000,00	
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	483,053,000	377,042,000	332,273,000,00	437,766,000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1,210,697,620	391,255,900	230,368,600,00	230,368,600,00	
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	1,210,697,620	391,255,900	230,368,600,00	230,368,600,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4,664,745,000	3,502,895,150	2,269,454,935,00	2,500,598,935,00	
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4,664,745,000	3,502,895,150	2,269,454,935,00	2,500,598,935,00	
JUMLAH		33,698,188,739	30,654,299,619	6,884,222,002,00	7,564,181,175,00	

Sumber data : Diolah Tim dari Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Berdasarkan table 2.3 diatas, terlihat dinamika dalam proses penganggaran program dan kegiatan tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dimana terdapat perubahan-perubahan mulai dari usulan rencana kerja, pengesahan APBD Murni tahun 2025 hingga APBD Perubahan tahun 2025, perubahan tersebut dilakukan karena adanya dinamika pembahasan dengan TAPD maupun dengan DPRD Kabupaten Lampung Barat seriat untuk menyesuaikan dengan target kinerja dengan kemampuan keuangan daerah, perubahan yang cukup signifikan yaitu antara lain :

1. Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada awal penyusunan Rencana Kerja 2025 kegiatan ini diusulkan akan menganggarkan dana untuk pembiayaan kegiatan monitoring, evaluasi kinerja pegawai serta kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 26,872,000 namun setelah dilakukan pembahasan dengan TAPD Kabupaten Lampung Barat kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 20,273,000,00.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, pada Rencana Kerja 2025 kegiatan ini diusulkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145,520,000 yang diperuntukan bagi pengadaan kendaraan dinas roda dua, pengadaan meubelair kantor dan pengadaan peralatan dan mesin namun dengan memperhatikan keterbatasan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat maka kegiatan tersebut hanya mengakomodir pembiayaan untuk pengadaan meubelair kantor dan pengadaan peralatan dan mesin sedangkan untuk pengadaan kendaraan dinas ditiadakan.
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, pada awalnya kegiatan ini diusulkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,210,697,620 dimana setelah dilakukan pembahasan dengan TAPD Kabupaten Lampung Barat kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 230,368,600 dengan pengurangan anggaran yang cukup signifikan yaitu anggaran untuk kegiatan antara lain

meniadakan kegiatan promosi budaya daerah Kabupaten Lampung Barat di TMII, meniadakan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba (Tes Urine) kepada aparatur pemerintah, pengurangan target kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Prekursor Narkoba, efisiensi kegiatan pembinaan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) dan meniadakan kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Sedangkan perubahan anggaran mulai dari proses usulan dalam Rencana Kerja 2025 sampai dengan pengesahan DPA-APBD 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada program dan kegiatan lainnya merupakan perubahan yang disebabkan oleh dinamika saat pembahasan rencana kerja serta faktor pertimbangan atas kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

C. Target Kinerja Tahun 2025

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Target Kinerja Utama Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	ALASAN	FORMULASI /RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	$\frac{\Sigma \text{potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA}}{\Sigma \text{Jumlah Potensi Konflik SARA}} \times 100$	Jumlah Potensi Konflik SARA
			Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta	$\frac{\Sigma \text{ masyarakat yang mengikuti pesta demokrasi}}{\Sigma \text{ masyarakat yang mempunyai hak pilih}} \times 100$	Jumlah Masyarakat yang Mempunyai Hak Pilih
				Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	$\frac{\Sigma \text{ Ormas yang bermitra dengan pemerintah}}{\Sigma \text{ Ormas yang berada di Lampung Barat}} \times 100$	Jumlah Ormas yang Berada di Kabupaten Lampung Barat

Sumber data : *IKU 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat*

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan instrument pelaksanaan berupa program, kegiatan dan atau sub kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lampung Barat yang meliputi 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) subkegiatan.

Adapun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah seperti dibawah ini :

Tabel 2.5.
Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat	76.05 poin
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 dokumen
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	4 dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen

1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen
1	2	3	4
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun	1 dokumen
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun	1 dokumen
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen
1.1.7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak	18 orang.
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	2 laporan
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 laporan
1.2.1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur penerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang.
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 laporan
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	2 laporan
1.2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 laporan
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 dokumen
1.3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 dokumen
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	1 dokumen

1.4.1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	1 dokumen
--------	---	---	-----------

1	2	3	4
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	2 paket
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	6 dikumen
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
1.5.1.	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan.	1 paket
1.5.2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	2 paket
1.5.3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	6 dokumen
1.5.4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan
1.5.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	9 unit.
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	8 unit.
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 laporan.
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan.
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan

1.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	13 unit
1	2	3	4
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit
1.8.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit
1.8.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	85%
2.1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 dokumen.
		Jumlah Paskibraka.	50 orang.
2.1.1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang
2.1.2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang

2.1.3.	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 dokumen
2.1.4.	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra	50 orang

1	2	3	4
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	70%
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	213 orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	160 orang
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 laporan
3.1.1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	213 orang

3.1.2.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	160 orang
--------	---	--	-----------

1	2	3	4
3.1.3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 10 laporan	10 laporan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah 60%	60%
4.1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun sebanyak 1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 orang
4.1.1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen
4.1.2.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 orang
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	72%
5.1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	40 orang

	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 orang

1	2	3	4
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan
5.1.1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 orang
5.1.2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 orang
5.1.3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100%

6.1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 laporan

1	2	3	4
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 laporan
	Forum koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen

Sumber data : Diolah Tim dari Dokumen Rencana Aksi dan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

BAB III

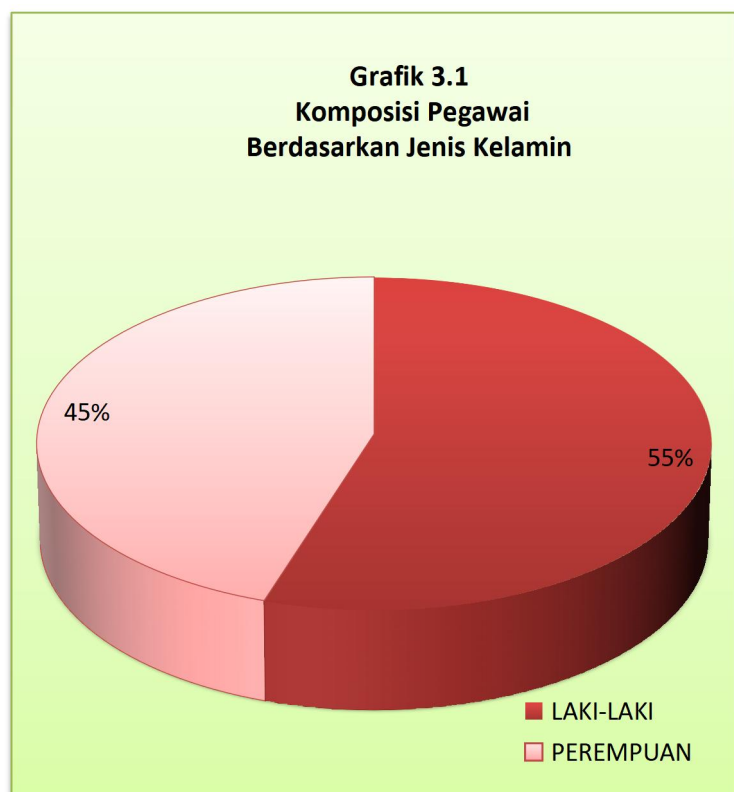
KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

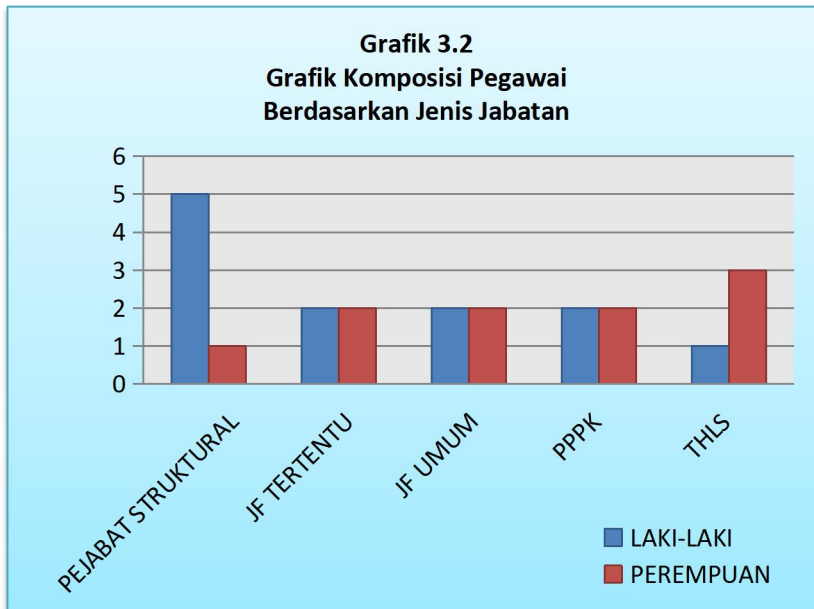
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik maka perlu didukung dengan ketersediaan SDM Aparatur yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Pada akhir tahun 2025 terdapat 22 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 14 orang, PPPK 4 orang dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebanyak 4 orang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya jumlah antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yaitu sebanyak 55% dan sisanya sebanyak 45% merupakan pegawai perempuan atau Pegawai Laki laki 12 orang, dan wanita sebanyak 10 orang.



Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Kepegawaian ASN Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.



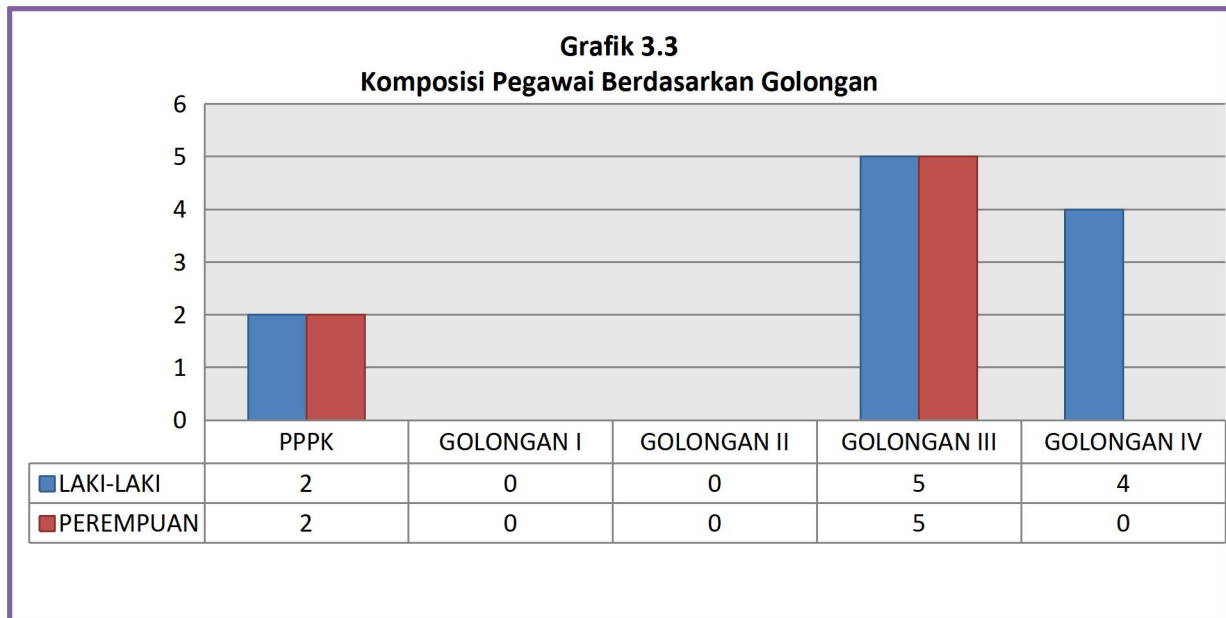
Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Kepegawaian ASN Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 6 orang pejabat struktural, 4 orang fungsional tertentu dan 4 orang staf fungsional umum, 4 orang PPPK dan 4 orang Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dengan komposisi 30% pejabat struktural dan 70% non struktural.

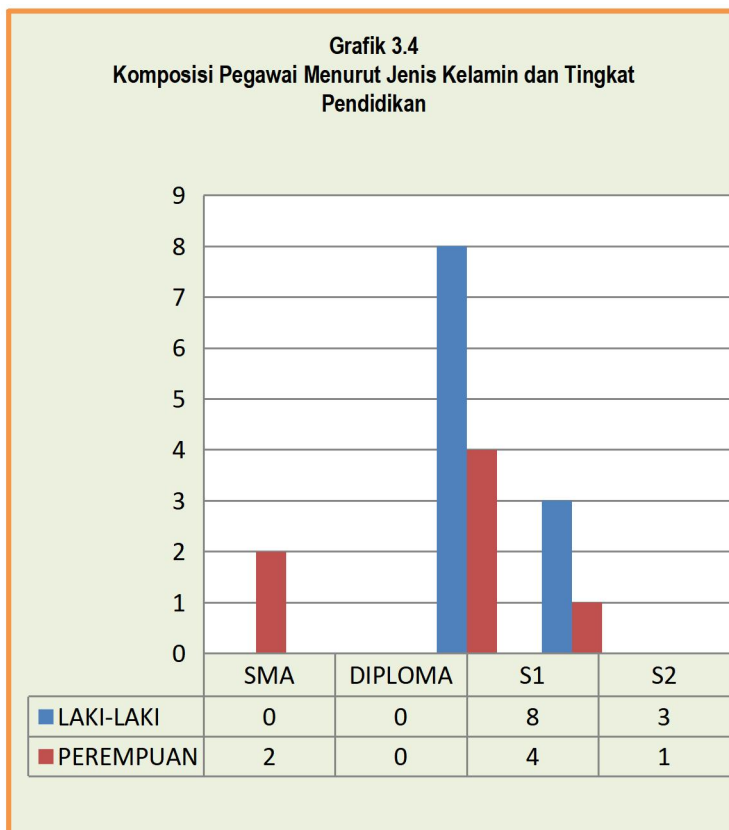
Tabel 3.1.
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2025

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	STATUS PENGISIAN JABATAN
1	Kepala Badan Kesbangpol	1 orang	Ada
2	Sekretaris Badan Kesbangpol	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	2 orang	
	➤ Kabid. Poldagri dan Ormas	1 orang	Ada
	➤ Kabid. IWK dan KESBA	1 orang	Ada
	➤ Kabid. KNPK	1 orang	Ada
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 orang	Ada
5	Pejabat Fungsional Tertentu		
	➤ JF Perencana Ahli Muda		Tidak ada
	➤ JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	4 orang	Ada
6	PPPK	4 orang	Ada
7	Fungsional Umum	4 orang	Ada
8	THLS	4 orang	Ada

Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Kepegawaian ASN Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.



Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Kepegawaian ASN Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.



Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Kepegawaian ASN Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural dibanding perempuan. Selain itu pada tingkat eselon yang semakin tinggi menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan semakin mengecil. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan karir perempuan sehingga semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.

Bila pegawai dipilah menurut pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa pendidikan tingkat SMA sampai dengan pendidikan Diploma masih didominasi oleh Perempuan, sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi S1 sampai dengan S2 jumlah pegawai laki-laki masih mendominasi dibanding jumlah pegawai perempuan.

Sedangkan apabila data dipilah menurut pendidikan pada tiap golongan menunjukkan bahwa PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagian terbesar adalah golongan III dengan pendidikan S1 sebanyak 45,16% Rincian detail pegawai menurut pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	PENDIDIKAN	GOL IV	GOL III	GOL II	PPPK	THLS
1	SLTA	-	1	-	1	1
2	Diploma III	-	-	-	-	-
3	Sarjana	1	8	-	3	3
4	Pasca Sarjana	3	1	-	-	-
	JUMLAH	4	10	-	4	4

Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Kepegawaian ASN Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan data pegawai diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat masih sangat terbatas, meskipun demikian dengan keterbatasan jumlah pegawai tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi secara baik serta dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan hal ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat cenderung terbatas, namun pelaksanaan tugas dan fungsi tetap dilaksanakan secara maksimal guna mencapai target program dan kegiatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Barang	Ukuran/ CC	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Toyota Rush	1495	2012	1 unit	Baik
2	Mobil Toyota Kijang Kapsul	1781	2003	1 unit	Baik
3	Motor Honda CB150 Verza CW	150	2021	1 Unit	Baik
4	Motor Kawasaki KLX 150 G	150	2016	1 Unit	Baik
5	Motor TS 125	125	2003	1 unit	Baik
6	Motor Honda MCB Win	97	2004	1 unit	Baik
7	Motor Suzuki A 100		1994	1 unit	Rusak
8	Genset 5000 w	5000 watt	2005	1 unit	Rusak
9	Meja Biro	1 Biro	2008	4 bh	Baik
10	Meja ½ Biro	½ Biro	1992	8 bh	Baik
11	Meja Biasa	½ Biro	1992	3 bh	Baik
12	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	10 bh	Baik
13	Meja ½ Biro	½ Biro	2003	1 bh	Baik
14	Meja ½ Biro	½ Biro	2006	1 bh	Baik
15	Meja Kerja ½ Biro	½ Biro	2008	2 bh	Baik
16	Kursi Biro	1 Biro	1992	3 bh	Baik
17	Kursi Putar 1 Biro	1 Biro	2008	3 bh	Baik
18	Kursi Putar	½ Biro	1992	1 bh	Baik
19	Kursi Putar Besar		1992	1 bh	Baik
20	Kursi Putar		1992	3 bh	Baik
21	Kursi Putar ½ Biro		2008	5 bh	Baik
22	Kursi Lipat	Standart	2001	3 bh	Baik
23	Kursi Lipat	Standart	2005	4 bh	Baik
24	Kursi Rapat	Standart	2008	10 bh	Baik
25	Kursi Tamu		2007	1 set	Baik
26	Sofa/Sice		2008	1 set	Baik
27	Papan Kegiatan		1992	1 bh	Baik
28	Papan Data		1999	1 bh	Baik
29	Komputer		2007	2 bh	Baik
30	Komputer Notebook		2008	1 bh	Baik
31	Filling Kabinet Kantor		2007	2 bh	Baik

1	2	3	4	5	6
32	Filling Kabinet		2008	6 bh	Baik
33	Cermin		1992	1 bh	Baik
34	Lemari Besi		2008	6 bh	Baik
35	Mesin Tik		1999	1 bh	Baik
36	Mesin Tik		2008	1 bh	Baik
37	Brankas		2008	1 bh	Baik
38	Meja Komputer		2001	1 bh	Baik
39	Dispenser		2001	1 bh	Baik
40	Hordeng		2004	18 bh	Baik
41	Teralis		2004	31	Baik
42	Gambar Bupati/Wakil		2004	1 bh	Baik
43	Foto Presiden/Wakil		2005	1 bh	Baik
44	Foto Gubernur/Wakil		2005	1 bh	Baik
45	Pesawat Fax		2004	1 bh	Baik
46	Mesin Faximile		2008	1 bh	Baik
47	Meja Rapat		2008	1 bh	Baik
48	Lemari Buku		2008	1 bh	Baik
49	White Board		2008	1 bh	Baik
50	Papan Data Linmas		2008	1 bh	Baik
51	Papan Data Ormas & LSM		2008	1 bh	Baik
52	Komputer SIPKD	Core i-3	2010	1 unit	Baik
53	Printer SIPKD	Laser Jet	2010	1 unit	Baik
54	Komputer PC	Dual core	2012	2 unit	Baik
55	Komputer Notebook	Core i-3	2012	1 unit	Baik
56	White Board		2012	1 unit	Baik
57	Pesawat Telepon		2001	1 bh	Baik
58	Handycam		2007	1 bh	Baik
59	Wearless		2007	1 bh	Baik
60	Standart (Tripod Corong)		2008	1 bh	Baik
61	Kamera Digital	16 MP	2012	1 unit	Baik
62	Komputer PC	Dual core	2013	1 unit	Baik
63	Lemari Arsip	Besi	2016	4 unit	Baik
64	Kursi Lipat	Besi	2016	25 unit	Baik
65	Komputer PC Build Up	Core i-3	2016	2 unit	Baik
66	Cabinet 4 laci	Besi	2017	2 unit	Baik
67	Komputer PC Build Up	Core i-3	2017	1 unit	Baik
68	Komputer Notebook/Laptop	Core i-5	2017	1 unit	Baik

1	2	3	4	5	6
69	Kursi 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
70	Kursi ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
71	Meja 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
72	Meja ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
73	Mesin Tik	Manual	2017	1 unit	Baik
74	Meja Resepsionis		2021	1 unit	Baik
75	Kursi Lipat		2021	6 unit	Baik
76	Kursi	1 Biro	2021	1 unit	Baik
77	Proyektor		2021	1 unit	Baik
78	Layar Proyektor		2021	1 unit	Baik
79	Televisi		2021	1 unit	Baik
80	Gorden		2021	24 Meter	Baik
81	Tangga Lipat		2021	1 unit	Baik
82	UPS Komputer		2021	1 Unit	Baik
83	Mic Wireless Conferece		2021	1 Unit	Baik
84	Genset		2021	1 unit	Baik
85	Laptop	Acer	2021	1 unit	Baik
86	Rak besi temple dinding		2024	7 unit	Baik
87	Meja rapat		2024	1 unit	Baik
86	Printer multi fungsi	Brother	2024	1 Unit	Baik
87	Laptop	Acer	2024	2 unit	Baik

Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Inventaris BMD Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 7.564.181.175,00 (Tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta serratus delapan puluh satu ribu serratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.370.172.139,00 (Tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta serratus tujuh puluh dua ribu serratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 97,44% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD MURNI 2024	PAGU APBD PERUBAHAN 2024	REALISASI		KETERANGAN
				(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2,312,340,296,00	2,255,498,469,00	2,125,328,187	94.23	Pada program dan kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional rutin kantor antara lain Belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makan minum rapat, pembayaran tagihan jasa kantor, biaya koordinasi dan konsultasi pegawai serta pemeliharaan peralalatan dan gedung kantor.
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10,854,000,00	25,918,000,00	25,430,000,00	98.12	
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	2,044,158,196,00	1,857,332,369,00	1,751,122,568,00	94.28	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.234.000,00	1,399,000,00	1,399,000,00	100	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,273,000,00	20,273,000,00	5,581,000,00	27,53	
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,079,800,00	113,399,800,00	112,993,300,00	99.64	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,800,000,00	46,800,000,00	46,402,800,00	99,15	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,711,700,00	63,311,700,00	57,697,709,00	91,13	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,064,600,00	127,064,600,00	124,701,810,00	98.14	

1	2	3	4	5	6	7
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	947,443,918,00	1,347,607,918,00	1,342,667,260,00	99.63	<p>Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pembinaan Paskibraka Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. 2. Seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat. 3. Diklat pembentukan calon anggota Paskibraka Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sebanyak 50 orang siswa tingkat SLTA yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat. 4. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan peserta sebanyak 100 orang. 5. Sosialisasi pemahaman radikalisme, terorisme dan intoleransi sebanyak 100 orang.
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	947,443,918,00	1,347,607,918,00	1,342,667,260,00	99.63	
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	792,341,253,00	792,341,253,00	790,895,803,00	99.82	<p>Anggaran pada program ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upgrade aplikasi untuk pemantauan hasil penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan nama aplikasi SiTepat. 2. Pelatihan untuk petugas input aplikasi SiTepat sebanyak 213 orang. 3. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Desk Pemilu dan Pilkada 2024 Kab. Lampung Barat 4. Sosialisasi per-Undang-Undangan bidang politik. 5. Penyelenggaraan forum diskusi politik bagi anggota partai politik berserta pihak-pihak terkait. 6. Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mempunyai perwakilan sebagai anggota di DPRD Kabupaten Lampung Barat. 7. Hibah uang kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik	792,341,253,00	792,341,253,00	790,895,803,00	99.82	



1	2	3	4	5	6	7
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	332,273,000,00	437,766,000,00	436,806,000,00	99.78	Pada program dan kegiatan dialokasi anggaran untuk membiayai kegiatan antara lain : 1. Penyusunan data keberadaan partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbadan hukum yang ada di Kabupaten Lampung Barat. 2. Penyelenggaraan kegiatan forum silaturahmi dan sosialisasi kepada anggota Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat. 3. Bantuan hibah uang kepada Ormas berbadan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	332,273,000,00	437,766,000,00	436,806,000,00	99.78	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	230,368,600,00	230,368,600,00	228,284,050,00	99.10	Pada program ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Mengikuti ajang pameran produk unggulan Kabupaten Lampung Barat di TMII dalam rangka mendukung revitalisasi anjungan TMII di Jakarta. 2. Pembinaan Pekon Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau yang telah ditetapkan sebagai Pekon Bersinar (Pekon Bersih Narkoba). 3. Sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada para pelajar. 4. Bantuan hibah uang dan fasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi anggota FKUB Kabupaten Lampung Barat. 5. Kegiatan survey penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung.
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	230,368,600,00	230,368,600,00	228,284,050,00	99.10	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,269,454,935,00	2,500,598,935,00	2,446,190,839,00	97.82	Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain : 1. Pemantauan keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Lampung Barat. 2. Pemantauan kondisi wilayah dalam rangka kesiapsiagaan dini. 3. Penyelenggaraan koordinasi antara pimpinan daerah dengan lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Lampung Barat. 4. Bantuan hibah uang dan barang kepada instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,269,454,935,00	2,500,598,935,00	2,446,190,839,00	97.82	
JUMLAH		6,884,222,002,00	7,564,181,175,00	7,370,172,139,00	97.44	

Sumber Data : Diolah tim dari Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut LHEI 2025

NO	REKOMENDASI LHE AKIP	TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
1	Setiap Pegawai agar membuat Laporan Pengukuran Kinerja atau SKP Triwulan	ASN dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Laporan Pengukuran Kinerja atau SKP secara periodik setiap bulan pada aplikasi https://kinerja.bkn.go.id . Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN.	Tersusunnya SKP tiap ASN secara periodik setiap bulan yang berbasis e-kinerja	Tahun 2025	Kepala Badan	Telah di Proses pelaksanaan dimulai sejak bulan Januari 2025. Bukti Dukung https://drive.google.com/file/d/12tpByxo-kP2oL01cmQ_Yrqnd8fN-7vFL/view?usp=sharing
2	Memberikan Reward terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta mamaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan	Pada Perhitungan TPP Badan Kesbangpol telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang salah satu didalamnya menyebutkan bahwa Perhitungan berdasarkan pada produktivitas kinerja menggunakan Aplikasi e-kinerja yang dikeluarkan oleh BKN. TPP dibayarkan pada Pegawai berdasarkan penilaian produktivitas kerja (60%) dan penilaian disiplin kinerja (40%) hal ini menunjukkan bahwa pembayaran Tambahan	Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan pengukuran kinerja	Tahun 2025	Kepala Badan	Telah di Proses pelaksanaan dimulai sejak bulan Januari 2025. bukti dukung https://drive.google.com/file/d/1ART1yC9Ojez0KiFhZpZTGo4FkmGOKTAY/view?usp=sharing

	<p>Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP.</p>	<p>Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja telah didasarkan pada kinerja</p>				
--	---	--	--	--	--	--

B. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Sasaran Strategis sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, adapun indikator kinerja utama serta target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 adalah :

Tabel 4.1

**Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	86%	86%
		Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,54%	5,54%

Sumber data : IKU 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

1. Sasaran Menurunnya Konflik SARA dengan indikator kinerja Persentase Pengurangan Konflik SARA.

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat, upaya pencegahan yang dilakukan dimulai dari deteksi dini adanya potensi konflik hingga upaya penyelesaian agar potensi tersebut tidak menjadi sebuah peristiwa konflik.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya pencegahan terjadinya konflik SARA pada tahun 2025 antara lain :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

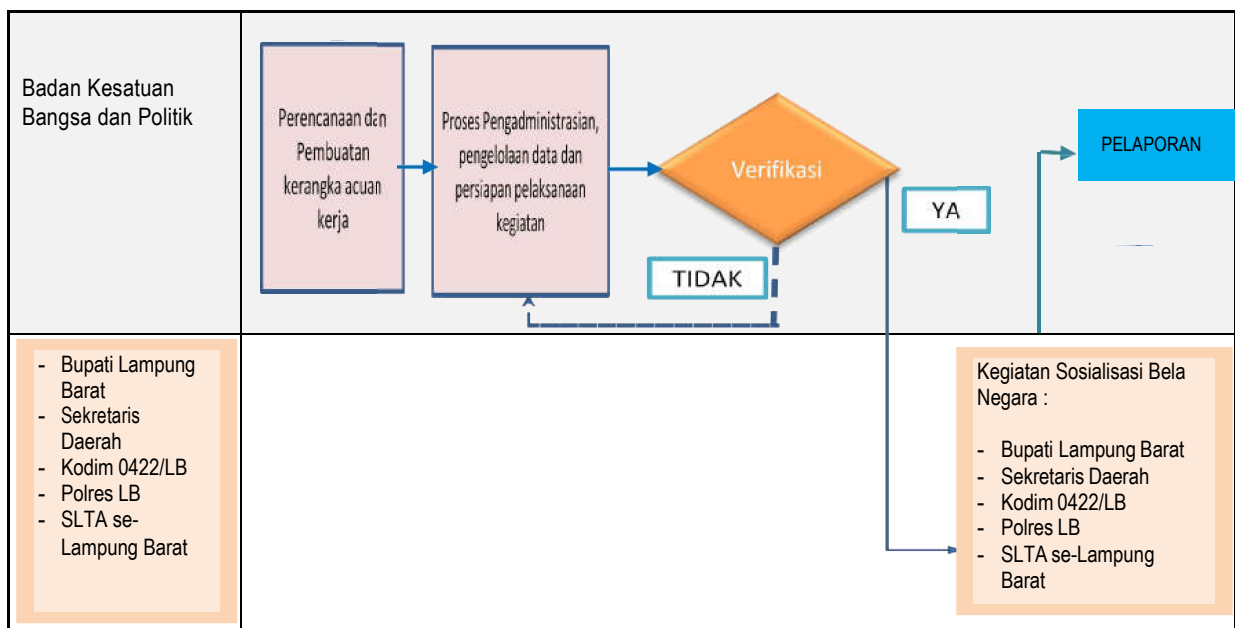
Pada program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

1) Kegiatan sosialisasi-sosialisasi antara lain :

- Sosialisasi Pemahaman Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi dengan sasaran peserta adalah para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan sosialisasi dengan materi tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2025.
- Sosialisasi dengan materi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan sasaran kegiatan sosialisasi adalah para siswa tingkat SLTA diwilayah Kecamatan Belalau dan Kecamatan Batu Ketulis yang diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang bertempat di SMAN 1 Belalau, pada tahun 2023 kegiatan ini menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan fokus materi tentang bela negara yang diberikan kepada para generasi muda khususnya siswa-siswi SLTA diwilayah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta sebanya 80 orang sedangkan pada tahun 2022 jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi bela negara sebanyak 41 orang dengan sasaran peserta adalah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaen Lampung Barat. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan aktif berkontribusi untuk kemajuan bangsa khususnya dikalangan generasi muda.

Perlibatan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat diperlukan antara lain dari unsur TNI/Polri melalui Kodim 0422/Lampung Barat dan Polres Lampung Barat serta dari Kejaksaan Negeri Liwa sebagai narasumber untuk memberikan pembekalan tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa serta memberikan pembekalan dan penyuluhan hukum bagi para generasi muda. Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :

Gambar IV.1.
Peta Proses Bisnis Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan



Sumber data : Peta Proses Bisnis Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat .



**Sosialisasi Pemahaman Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
Tahun 2025.**

- 2) Menyelenggarakan kegiatan pembentukan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Lampung Barat tahun 2025.

Pada kegiatan ini jumlah peserta yang rekrut sebagai Paskibra Tingkat Kabupaten Lampung Barat sebanyak 50 orang yang berasal dari siswa-siswi SLTA yang ada di Kabupaten Lampung Barat, disamping itu pada tahun 2025 ini terdapat 3 (tiga) orang siswa dari SLTA di Kabupaten Lampung Barat yang lulus seleksi Paskibra Tingkat Provinsi Lampung sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dan satu mengikuti seleksi Nasional tetapi belum lulus untuk tingkat nasional.

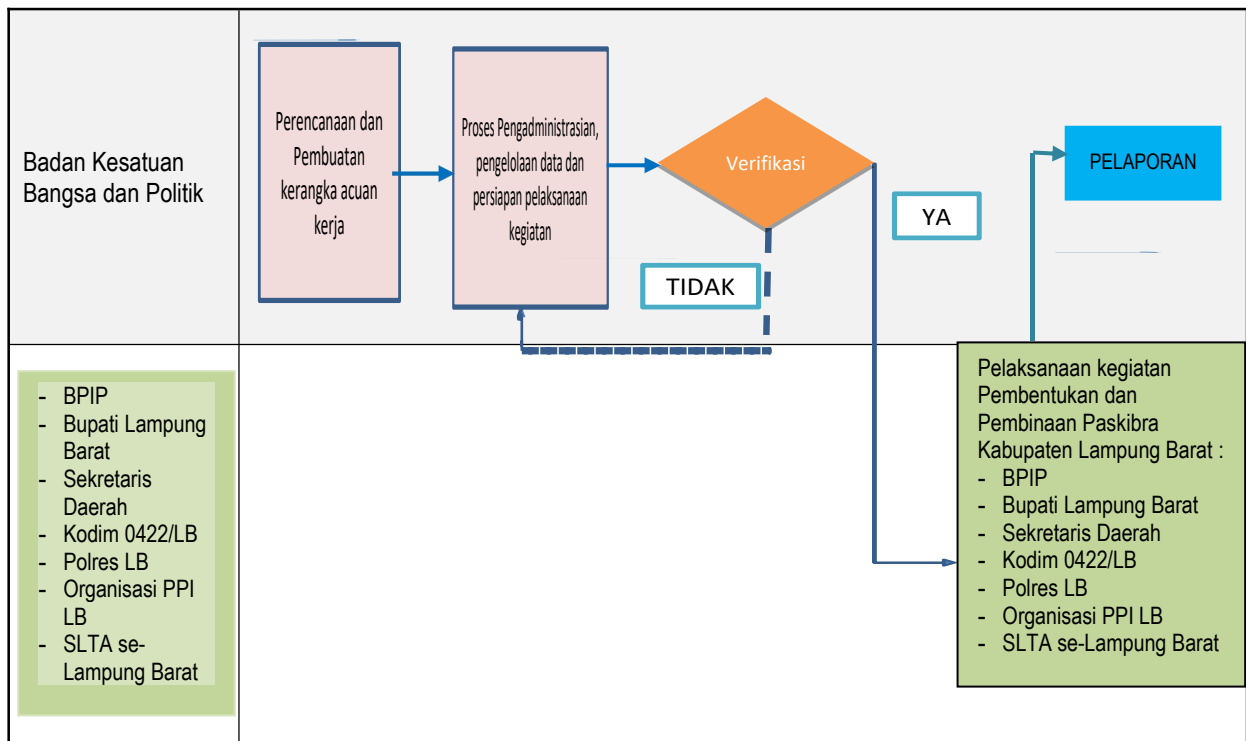
Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Lampung Barat antara lain perangkat daerah terkait dilingkungan Pemkab. Lampung Barat dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selaku pihak penyelenggara pendidikan paskibra Kabupaten Lampung Barat. Untuk keterlibatan pihak eksternal

yaitu Kodim 0422/Lampung Barat, Polres Lampung Barat dan organisasi PPI Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pendidik dan pelatih pada tahap pembetulan sekaligus keterlibatan instansi tersebut pada saat penugasan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT RI.

Keterlibatan unsur utama lain pada kegiatan ini adalah pihak SLTA yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat selaku pihak yang mengirim anggota Paskibra. Sedangkan keterlibatan instansi lainnya pada pemerintah pusat yaitu BPIP RI selaku pembina Paskibraka Tingkat Nasional. Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut:

Gambar IV.2.

Peta Proses Bisnis Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka



Sumber data : Peta Proses Bisnis Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat



**Pelaksanaan Seleksi, Diklat dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.**

b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Melalui program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan antara lain :

- 1) Mengikuti event promosi produk unggulan daerah Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya revitalisasi anjungan daerah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jakarta. Revitalisasi tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi anjungan sebagai sarana promosi budaya, pariwisata, serta potensi daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap daerah dapat menampilkan kekayaan budaya sekaligus memperkenalkan produk unggulan yang menjadi ciri khas wilayahnya kepada masyarakat luas. Adapun produk unggulan yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut merupakan produk asli hasil karya masyarakat lokal, yang meliputi berbagai jenis makanan khas, kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya yang

dihasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lampung Barat. Produk-produk tersebut tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dan identitas budaya daerah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Partisipasi dalam kegiatan promosi ini telah secara konsisten diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2023. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk-produk unggulan daerah. Melalui keikutsertaan dalam event tersebut, diharapkan produk-produk dari para pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lampung Barat dapat semakin dikenal oleh masyarakat nasional, membuka peluang kerja sama bisnis, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas

- 2) Pembinaan Pekon Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau yang telah ditetapkan sebagai Pekon Bersinar (Pekon Bersih Narkoba).

Kegiatan pembinaan ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat komitmen masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembinaan masyarakat, tetapi juga diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang melibatkan berbagai pihak terkait, di antaranya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung serta Kepolisian Resor Lampung Barat. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak negatif narkoba, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

Sebelumnya, pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan awal dalam rangka mendukung program tersebut, yaitu pencaanangan salah satu pekon

sebagai Pekon Bersinar (Pekon Bersih dari Narkoba). Pencanaan ini merupakan langkah strategis untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 kegiatan tersebut dilanjutkan melalui berbagai bentuk pembinaan kepada masyarakat, yang meliputi peningkatan kapasitas aparat pekon, penguatan peran tokoh masyarakat dan pemuda, serta pemberian edukasi berkelanjutan mengenai bahaya narkoba. Dengan adanya kegiatan pembinaan yang berkesinambungan ini, diharapkan program Pekon Bersinar dapat berjalan secara efektif dan mampu menjadi contoh bagi pekon-pekon lainnya dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.

3) Fasilitasi pelaksanaan koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama,

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama sebagai pilar utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam upaya ini, Pemerintah Daerah memberikan dukungan penuh kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lampung Barat sebagai wadah strategis dalam membangun dialog, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama.

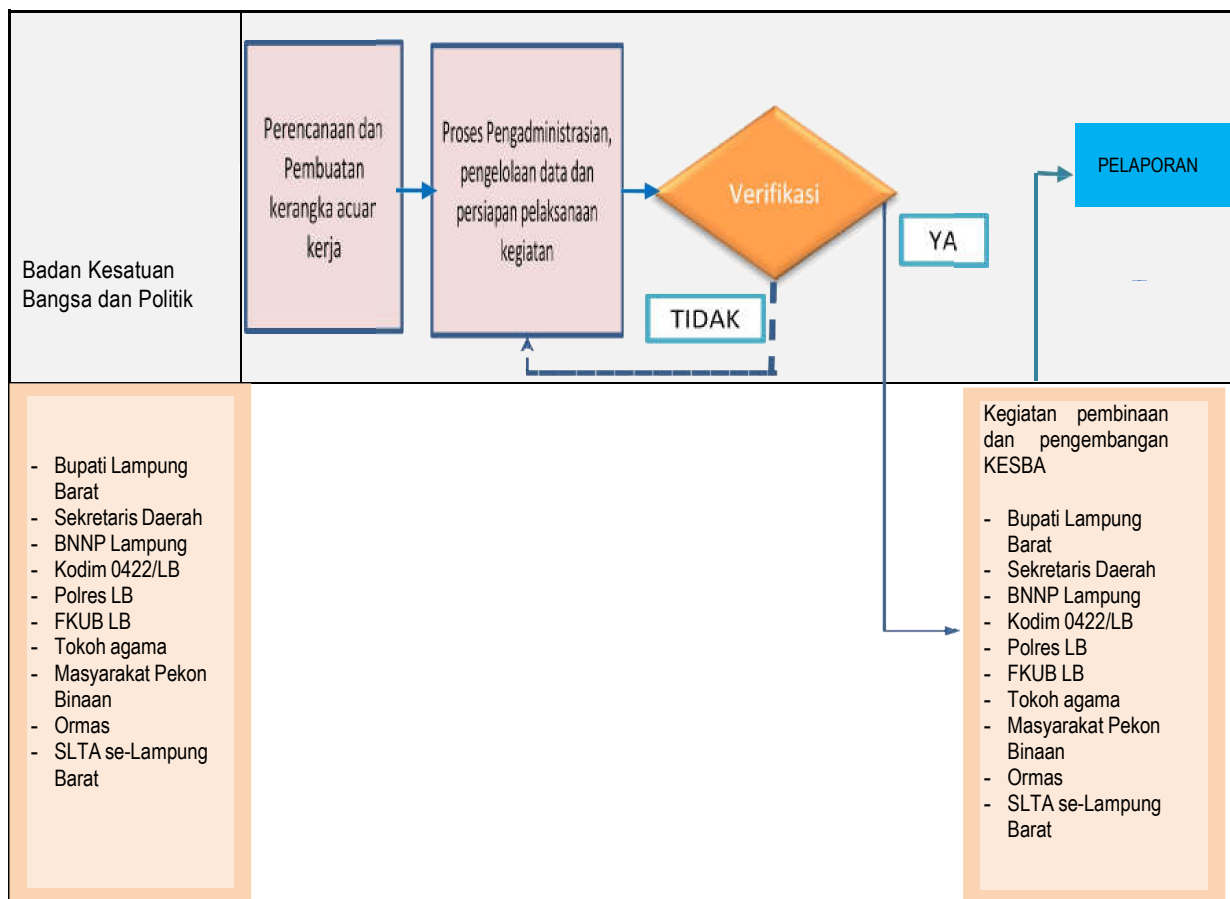
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berperan aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan FKUB, termasuk dalam upaya mediasi konflik keagamaan, sosialisasi nilai-nilai toleransi, serta penguatan kapasitas dalam merawat keharmonisan sosial. Dukungan ini juga diwujudkan dalam bentuk fasilitasi program kerja FKUB, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan pemuda lintas iman.

Pada tahun 2025 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan FKUB dalam mendorong terciptanya kehidupan beragama yang saling menghormati, sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

komitemen tersebut diwujudkan antara lain melalui fasilitasi rapat koordinasi internal FKUB maupun fasilitasi koordinasi lintas sektoral antara pengurus FKUB dengan unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat serta pemberian dana hibah untuk operasional kegiatan FKUB Kabupaten Lampung Barat.

Dari uraian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai target kinerja pada program tersebut melalui keterlibatan para pihak terkait mengenai tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing pihak tersebut dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :

Gambar IV.3.
Peta Proses Bisnis Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya



Sumber data : Peta Proses Bisnis Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat



FKUB Kabupaten Lampung Barat melakukan kordinasi lintas sektoral dengan unsur Forkopimda LB, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi wanita dan organisasi masyarakat lainnya.



Kegiatan Peran Anjungan Daerah di TMII Jakarta Tahun 2025 dengan menampilkan produk unggulan daerah Kabupaten Lampung Barat



Kegiatan Peran Anjungan Daerah di TMII Jakarta Tahun 2025 dengan menampilkan produk unggulan daerah Kabupaten Lampung Barat

b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka mencapai indikator hasil yang telah ditetapkan pada program maka telah dilaksanakan berbagai upaya-upaya kerja kegiatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Barat.

Dalam rangka menangani isu-isu penting yang perlu ditangani oleh lintas sektor dan lintas instansi yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Koordinasi dilaksanakan diantaranya melalui wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Barat yang terdiri dari Bupati Lampung Barat, Ketua DPRD Lampung Barat, Dandim 0422/LB, Kapolres Lampung Barat, Kajari Liwa, Kepala Pengadilan Negeri Liwa dan Kepala Pengadilan Agama Krui di Liwa serta para pimpinan kepala perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai *leading sector* kegiatan koordinasi yang bersifat formal melalui pelaksanaan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lampung Barat, pada tahun 2025 telah melaksanakan rakor sebanyak 3 kali dari target yang direncanakan sebanyak 4 kali sedangkan untuk tahun 2024 telah teralisasi sebanyak 4 kali.

2) Melakukan koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Barat.

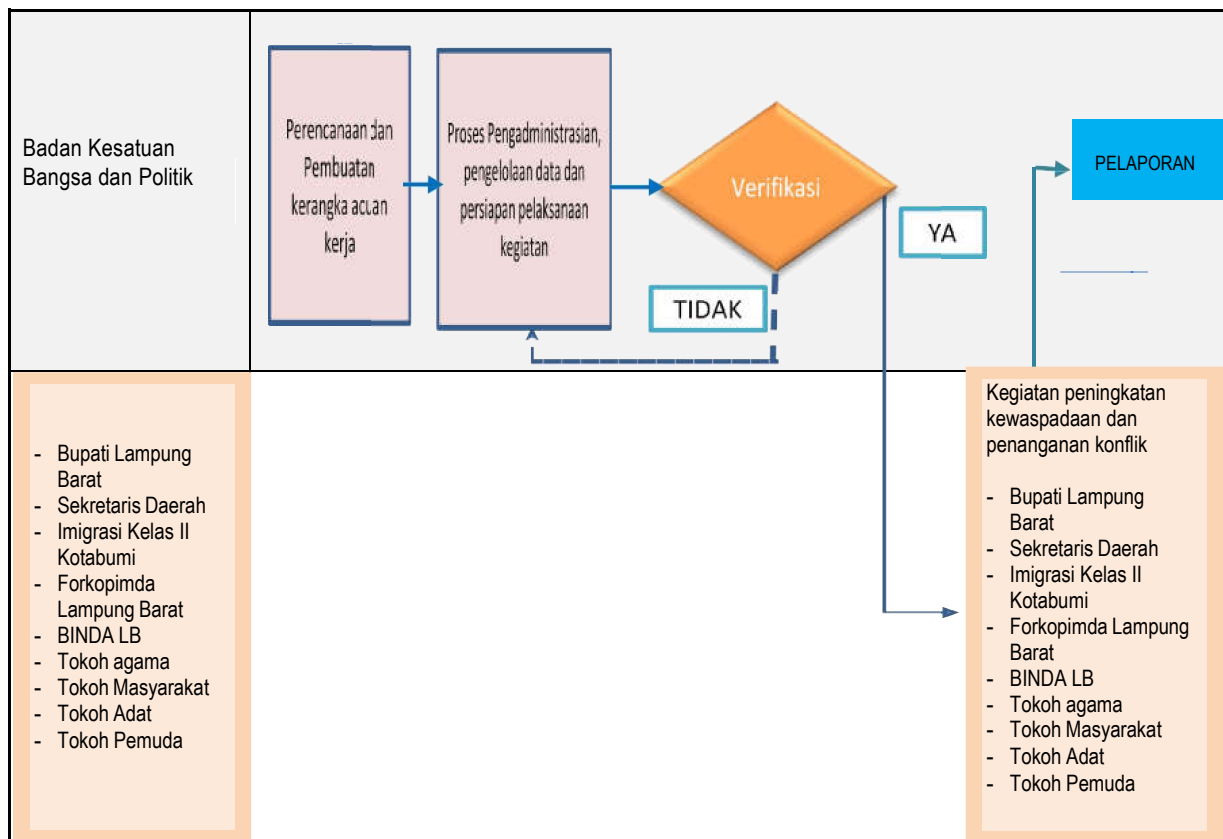
Komunitas ini terdiri atas Inteldim 0422/LB, Intel Polres LB, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Liwa, Korwil BINDA Lampung Barat dan Kanit Intelkam Polsek Balik Bukit. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka upaya deteksi dini dan kewaspadaan dini terhadap adanya potensi-potensi terjadinya konflik dan potensi gangguan keamanan yang dimungkinkan timbul di lingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Barat

3) Menyelenggarakan koordinasi dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Timpora) Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Tim koordinasi ini terdiri dari unsur Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Kodim 0422/LB, Polres Lampung Barat, Kejari Liwa, Pengadilan Negeri Liwa dan perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Koordinasi dilakukan antara lain dalam rangka pemantauan keberadaan orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Dari uraian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai target kinerja pada program tersebut melalui keterlibatan para pihak terkait mengenai tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing pihak tersebut dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :

Gambar IV.4.
Peta Proses Bisnis Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik



Sumber data : Peta Proses Bisnis Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat



Kegiatan Koordinasi Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.



Pelaksanaan Rakor Forkopimda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.



Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Dari uraian pelaksanaan program-program yang diterjemahkan dalam pelaksanaan kegiatan-giatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Analisis dalam mencapai target kinerja pada indikator sasaran tersebut yaitu :

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%

Perolehan angka realisasi tersebut diperoleh dari formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA}}{\text{Jumlah Potensi Konflik SARA}} \times 100 \%$$

$$\frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$$

Perolehan angka potensi konflik dan penyelesaian potensi konflik agar tidak menjadi sebuah peristiwa konflik adalah dari adanya dua permasalahan yang berpotensi menjadi peristiwa konflik dilingkungan masyarakat yaitu:

- a) Potensi konflik yang dipicu oleh adanya gangguan hewan liar dimana terdapat masyarakat yang dimangsa oleh harimau dan lingkungan pemukiman penduduk yang dirusak oleh kawanannya di wilayah Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat. Dari peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dengan petugas pos jaga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang berada di Kecamatan Suoh.
- b) Potensi konflik dipicu oleh adanya keberatan masyarakat dengan rencana pembangunan gereja di Pekok Pekon Balak Kecamatan Balik Bukit, alasan penolakan masyarakat dilingkungan rencana pembangunan gereja tersebut dikarenakan pada lingkungan tersebut sudah berdiri 3 buah gereja, dan selanjutnya untuk penanganan masalah tersebut akan dilakukan secara internal dikalangan umat Kristen.

Dengan adanya dua peristiwa yang potensial dapat menimbulkan konflik tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat bersama-sama dengan pihak Polres Lampung Barat, Kodim 0422/Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa, MUI Lampung Barat dan pengurus FKUB Lampung Barat melakukan proses penyelesaian dan solusi terbaik untuk para pihak terkait, dengan adanya penanganan yang cepat dan tepat tersebut maka potensi konflik tersebut dapat diredam dan diselesaikan dengan baik sehingga sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Lampung Barat tidak terjadi konflik SARA.

Kondisi ini jika dikaitkan dengan realitas dilingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Barat tentunya sangat relevan mengingat sepanjang tahun 2025 wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat aman dan kondusif dari ancaman konflik SARA serta kehidupan masyarakat yang rukun hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian indeks kerukunan umat beragama yang di laksanakan oleh Universitas Lampung, dimana dari hasil penilaian tersebut diperoleh hasil sebesar 90.50 poin dengan kategori Sangat Tinggi, nilai indeks KUB Kabupaten Lampung Barat ini melampaui nilai indeks KUB yang di capai oleh Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 73.3 poin dan juga melampaui nilai indeks KUB nasional tahun 2024 sebesar 76.47 poin.

2. Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

a. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

Realisasi indikator partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi pada tahun 2025 tercatat tidak tercapai dikarenakan faktor kondisi yang bersifat objektif. Hal ini terjadi karena sepanjang tahun anggaran 2025 tidak terdapat agenda pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengingat seluruh tahapan pemungutan suara besar telah tuntas diselenggarakan pada siklus tahun 2024. Oleh karena itu, secara teknis tidak terdapat momentum bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, sehingga angka persentase

partisipasi di tempat pemungutan suara (TPS) tidak dapat diukur atau bernilai nihil.

Meskipun aktivitas pencoblosan tidak ada, pemerintah daerah tetap fokus menjaga kualitas demokrasi melalui berbagai program edukasi politik dan penguatan wawasan kebangsaan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesadaran bernegara masyarakat tetap tinggi dan siap menyukseskan agenda demokrasi di masa mendatang. Dengan demikian, tidak tercapainya target ini bukan disebabkan oleh kinerja program yang kurang optimal, melainkan karena ketiadaan peristiwa politik yang menjadi dasar penghitungan data partisipasi tersebut.

b. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah.

Target indikator tersebut pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 5.54 % yang artinya terdapat 5.54% organisasi masyarakat maupun LSM yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat telah menjalin kemitraan dan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, adapun jumlah ormas/LSM yang terdata berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 429 ormas/LSM.

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk pencapaian target pada program tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- 1) Melaksanakan forum silaturahmi antara instansi pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kegiatan ini diikuti oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kodim 0422/LB, Polres Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa serta pengurus Ormas/LSM dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.



2) Bantuan hibah uang kepada Ormas berbadan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.

Bantuan hibah ini diberikan kepada ormas dan LSM yang guna untuk membantu kegiatan operasional ormas tersebut sekaligus sebagai bentuk perhatian dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan elemen organisasi kemasyarakatan. Besaran hibah uang kepada ormas tersebut pada tahun 2023 sebesar Rp. 263.000.000,00 dengan jumlah ormas penerima hibah sebanyak 23 ormas, tahun 2024 sebesar Rp. 360.000.000,00 dengan jumlah ormas penerima hibah sebanyak 27 ormas sedangkan pada tahun 2025 jumlah ormas yang direncanakan menerima hibah sebanyak 29 ormas/LSM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 317.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 317.000.000,00, secara terinci penerima hibah sebagaimana table berikut :

Tabel 4.5.
Hibah Uang Kepada Ormas/LSM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2025	
				PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Forum Masyarakat Peduli Lampung Barat (FMPLB)	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000



2	Kebudayaan Silat Dan Tari Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir Lampung (TTKKDH)	10,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
3	Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP)	10,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000
4	Paguyuban Lambar Bersatu (PLB)	30,000,000	30,000,000	25,000,000	25,000,000
5	Persatuan Olahraga Dan Seni Pencak Silat Kiluandan (POSPSK)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
6	Laskar Merah Putih (LMP)	10,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000
7	Senkom Mitra POLRI	5,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000
8	Pemuda Pancasila Lampung Barat	40,000,000	35,000,000	25,000,000	25,000,000
9	DPC Pejuang Siliwangi	50,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000
10	Perguruan Paku Banten	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
11	POSPERA Cabang Lampung Barat	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
12	PSHT Pusat Madiun Kabupaten Lampung Barat	25,000,000	23,000,000	15,000,000	15,000,000
13	Garuda Bakti Nusantara	10,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000
14	BIDIK DPC Lampung Barat	10,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000
15	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	20,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000
16	IKB Bumi Basway Lampung Barat	30,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000
17	PO Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Lampung Barat	10,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000
18	Lembaga Transparansi Kebijakan Daerah (TEKAD)	10,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000
19	TTKKDH		-	10.000.000	10.000.000
20	Pemuda Batak Bersatu	5,000,000	10,000,000	7,500,000	7,500,000
21	Lembaga Komunitas Peduli Rakyat (LKPR)	5,000,000	-	7,500,000	7,500,000
22	TRINUSA		-	10.000.000	10.000.000
23	Yayasan DKM Peduli Indonesia	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
24	Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	-	50,000,000	20,000,000	20,000,000
25	Pujakesuma	-		10.000.000	10.000.000
26	Lembaga Investigasi Negara (LIN)			10.000.000	10.000.000
27	PERISAI DIRI	-		10.000.000	10.000.000
28	PSHT KABUPATEN LAMPUNG BARAT	-		10.000.000	10.000.000

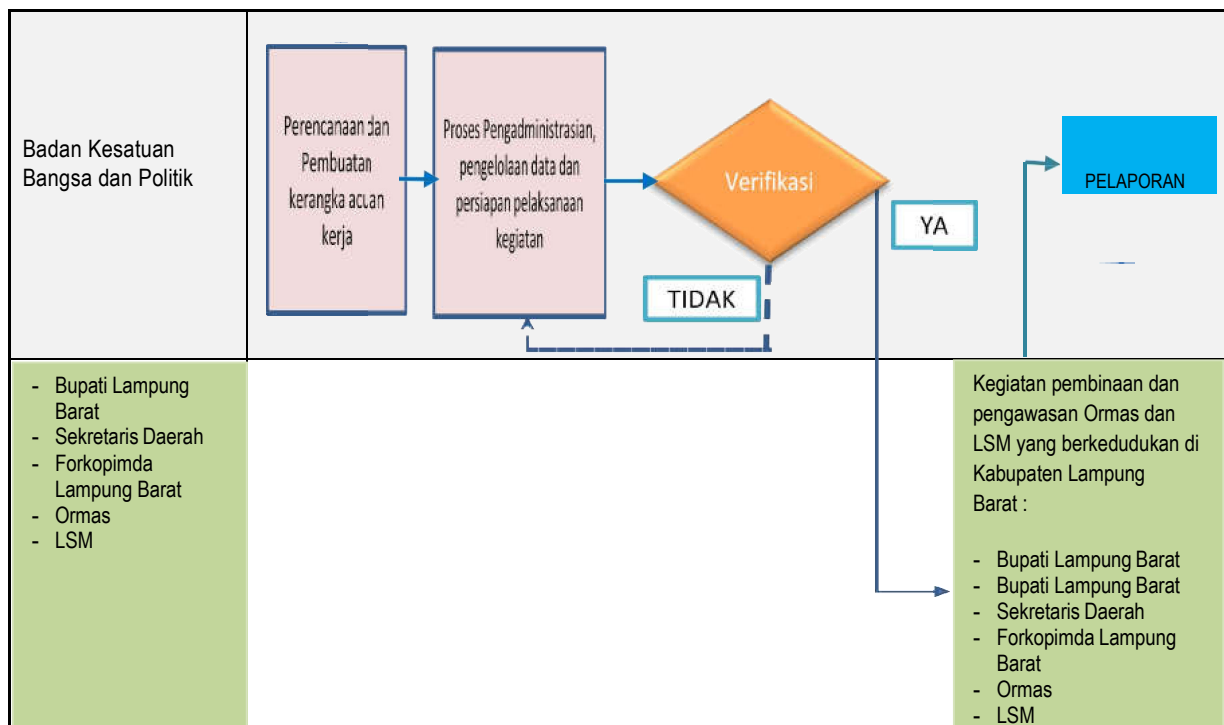
29	Suzuki Katana Jimny Indonesia (SKIN) Chapter Lampung Barat	-	10,000,000	7,500,000	7,500,000
JUMLAH		365,000,000	427,000,000	317,000,000	317,000,000

Sumber data : Diolah Tim dari Laporan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat.

Dari uraian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai target kinerja pada program tersebut melalui keterlibatan para pihak terkait mengenai tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing pihak tersebut dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :

Gambar IV.6.

Peta Proses Bisnis Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM



Sumber data : Peta Proses Bisnis Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat

Dari pelaksanaan program yang diterjemahkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Analisis dalam mencapai target kinerja pada indikator sasaran tersebut yaitu :

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5.54%	6.99%

Perolehan angka realisasi tersebut diperoleh dari formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ormas yang bermitra dengan pemerintah}}{\text{Jumlah Ormas Yang Ada di Kabupaten Lampung Barat}} \times 100 \%$$

$$\frac{29}{429} \times 100 \% = 6,99 \%$$

Perolehan angka 29 didapat dari jumlah ormas yang mendapatkan pembinaan dan mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sedangkan angka 429 merupakan jumlah dari Ormas/LSM yang terdaftar keberadaannya di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini :

Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 5.54 % terealisasi 6.99 %, yang artinya target Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah telah melampaui target yang ditetapkan, persentase capaian realisasi sebesar 126%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 6.99% sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 adalah 6.42 % dan tahun 2023 adalah 5.73%, sehingga terlihat bahwa organisasi masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terus meningkat pada setiap tahunnya hal ini tentunya sangat mendukung kehidupan demokrasi dalam wujud kebebasan berkumpul dan berserikat bagi warga masyarakat.

3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target kinerja jangka menengah.

Target kinerja dimaksud telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, realisasi kinerja pada tahun 2025 ini sudah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan pada rencana strategis perangkat daerah sebesar 5,54% dan telah tercapai sebesar 6,99% atau dengan prosentase tingkat capaian 126 %.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

Secara nasional indikator ini tidak menjadi target kinerja utama, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak menetapkan indikator yang sejalan dengan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Terjaganya harmonisasi antara pemerintah daerah dengan Organisasi Masyarakat/LSM yang keberadaannya terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui forum silaturahmi Ormas/LSM dengan pemerintah daerah serta adanya pemberian bantuan dana untuk mendukung kegiatan operasional ormas/LSM tersebut.

b. Terasilitasinya Kegiatan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

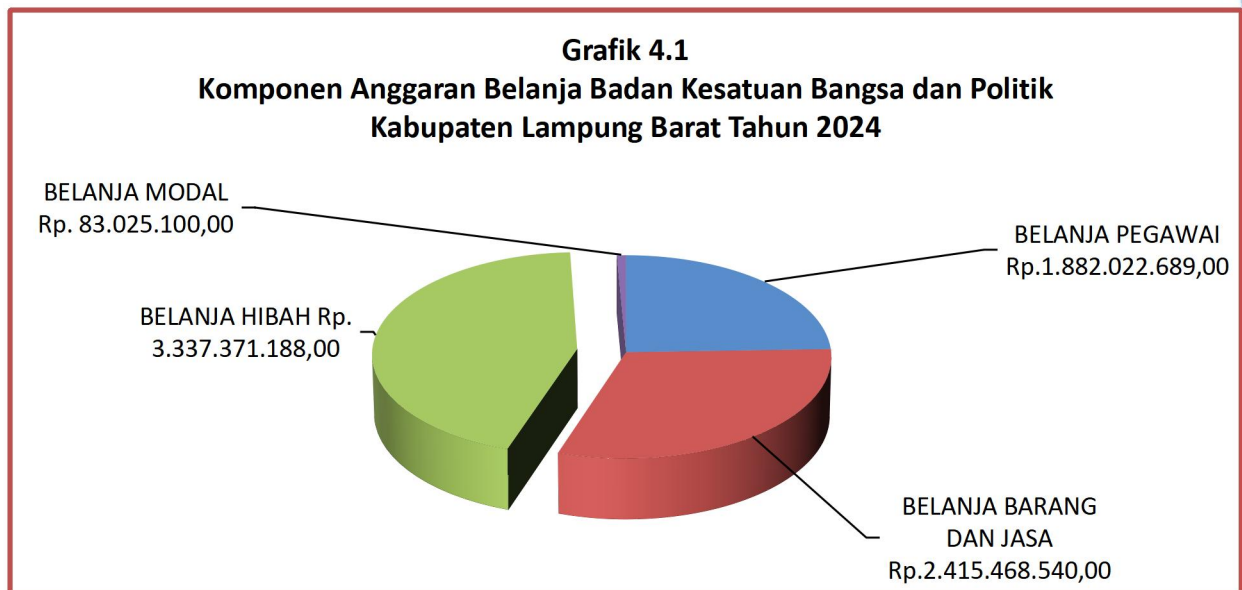
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk indikator Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah sudah efisien dikarenakan target yang direncanakan sebesar 5.54% tercapai sebesar 6.99%, adapun program Yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 502.042.000,00 dan terealisasi sebesar 95,49 % atau Rp. 479.433.203,00.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 tersebut terdiri atas komponen-komponen pos belanja antara lain Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.853.573.369,00 atau 24,50%, Belanja

Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.316.161.518,00 atau 30,62%, belanja hibah sebesar Rp. 3.337.371.188,00 atau 44,12% dan belanja modal sebesar Rp. 57.075.100,00 atau sebesar 0,75%.



Sumber data : Diolah Tim dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat

Anggaran pada komponen pos belanja tersebut telah digunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk merealisasikan atau menggunakan anggaran secara tepat dan efektif yang dialokasikan pada masing-masing sasaran program kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, dengan pagu anggaran belanja sebesar Rp. 7,564,181,175,00 (Tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran pada berakhirnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.370.172.139,00 (Tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 97,44% dengan rincian pagu dan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD MURNI 2025	PAGU APBD PERUBAHAN 2025	REALISASI	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2,312,340,296,00	2,255,498,469,00	2,125,328,187	94.23
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10,854,000,00	25,918,000,00	25,430,000,00	98.12
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	2,044,158,196,00	1,857,332,369,00	1,751,122,568,00	94.28
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.234.000,00	1,399,000,00	1,399,000,00	100
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,273,000,00	20,273,000,00	5,581,000,00	27,53
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,079,800,00	113,399,800,00	112,993,300,00	99.64
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,800,000,00	46,800,000,00	46,402,800,00	99,15
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,711,700,00	63,311,700,00	57,697,709,00	91,13
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,064,600,00	127,064,600,00	124,701,810,00	98.14
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	947,443,918,00	1,347,607,918,00	1,342,667,260,00	99.63
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	947,443,918,00	1,347,607,918,00	1,342,667,260,00	99.63
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	792,341,253,00	792,341,253,00	790,895,803,00	99,82
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik	792,341,253,00	792,341,253,00	790,895,803,00	99,82

1	2	3	4	5	6
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	332,273,000,00	437,766,000,00	436,806,000,00	99.78
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	332,273,000,00	437,766,000,00	436,806,000,00	99.78
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	230,368,600,00	230,368,600,00	228,284,050,00	99.10
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	230,368,600,00	230,368,600,00	228,284,050,00	99.10
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,269,454,935,00	2,500,598,935,00	2,446,190,839,00	97.82
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,269,454,935,00	2,500,598,935,00	2,446,190,839,00	97.82
	JUMLAH	6,884,222,002,00	7,564,181,175,00	7,370,172,139,00	97.44

Sumber data : Diolah Tim dari Dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi capaian program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pemanfaatan laporan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Melalui laporan kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengidentifikasi sejauh mana program-program strategis, seperti peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan dan politik, telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Analisis data dalam laporan ini menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu menjawab tantangan dan dinamika sosial-politik di Kabupaten Lampung Barat.

Selain sebagai alat evaluasi internal, laporan kinerja juga berperan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya laporan ini, transparansi dalam pengelolaan program dapat terjaga, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Pemanfaatan laporan kinerja juga memungkinkan Kesbangpol untuk menyusun strategi peningkatan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari hasil evaluasi, program-program pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta pemantauan dinamika sosial dapat disempurnakan agar lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Dengan mengoptimalkan laporan kinerja sebagai dasar perencanaan dan perbaikan program, Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat dapat terus berkontribusi dalam memperkokoh persatuan, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratis.

E. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan.

Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 100 % terealisasi 100% yang artinya konflik di wilayah Lampung Barat dapat terselesaikan sehingga kondisi Kabupaten Lampung Barat kondusif.

1. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 100% sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 adalah 100 % dan tahun 2023 adalah 100%, sehingga terlihat bahwa kondisi yang kondusif di Kabupaten Lampung Barat selalu terjaga.

2. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target kinerja jangka menengah.

Target kinerja dimaksud telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, realisasi kinerja pada tahun 2025 ini sudah mencapai target yang tertuang pada rencana strategis perangkat daerah, dengan prosentase tingkat capaian 100 %.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

Pemerintah pusat tidak menetapkan secara spesifik indikator dan target kinerja pengurangan konflik SARA, oleh karena itu target kinerja ini tidak mendapat perbandingan secara nasional.

Sedangkan untuk target kinerja pada tingkat Provinsi Lampung dapat dilihat pada salah satu Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang sejalan dengan dengan indikator tersebut yaitu Prosentase Menurunnya potensi konflik Sosial Tidak Menjadi Peristiwa Konflik Sosial Setiap Tahunnya di Provinsi Lampung dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100%.

Melihat target kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung tersebut, maka capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang sejalan dengan indikator tersebut telah pencapaian target kinerja tahun 2025 sebesar 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

- a. Koordinasi yang intens antara pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Barat serta Tim Penanganan Konflik Kabupaten Lampung Barat.
- b. Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat tentang kewaspadaan Nasional
- c. Diselenggarakannya rasa patriotisme dengan peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat serta pendidikan karakter.
- d. Mefasilitasi dan mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung Barat dalam membina kerukunan dan toleransi dilingkungan masyarakat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk indikator Persentase Pengurangan Konflik SARA sudah efisien dikarenakan target dapat tercapai 100%, adapun Program Yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan anggaran Rp. 5.971.414.126,00 dan terealisasi sebesar 99,56 % atau Rp. 5.945.374.835,00.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam laporan kinerja ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan berbagai program strategis dalam rangka menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, mendukung pemeliharaan kerukunan umat beragama serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Lampung Barat. Dari uraian capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam bab-bab sebelumnya telah dipaparkan target dan capaian serta permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang menunjukkan bahwa perangkat daerah ini telah berkontribusi dalam menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif, memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti optimalisasi sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dan politik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan inovasi terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Kesimpulannya, laporan kinerja ini menjadi bukti nyata komitmen Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas. Ke depan, diharapkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder dapat terus ditingkatkan guna memperkokoh persatuan, memperkuat demokrasi, dan menjaga stabilitas daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain :

1. Dukungan dari para pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, para pihak tersebut antara lain dari unsur Forkopimda Lampung Barat, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Kelembagaan Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, LSM serta masyarakat Lampung Barat pada umumnya.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, meskipun belum tersedia secara optimal namun dengan sarana prasarana yang dimiliki saat ini dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, meskipun pengalokasian pada komponen belanjanya belum proporsional yakni lebih besar belanja hibah dibanding dengan komponen belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.

C. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Ketersediaan sarana parasaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Penganggaran yang belum proporsional dimana komponen belanja hibah jauh lebih besar dibanding komponen belanja lainnya, dimana dalam upaya pencapaian target kinerja yang optimal diperlukan alokasi belanja barang dan jasa yang memadai.
3. Belum terpenuhinya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
4. Belum adanya kebijakan dalam regulasi dari perangkat daerah yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan bagi pejabat fungsional pasca dilakukannya penyederhanaan struktur birokrasi.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan.

Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja :

1. Pengalokasian anggaran secara proporsional antara komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja hibah, hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik.
2. Pemenuhan kebutuhan minimal atas ketersediaan sumber daya organisasi, baik ketersediaan SDM aparatur maupun pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
3. Perlunya regulasi yang jelas terkait pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tiap-tiap pegawai, khususnya pada jabatan fungsional oleh perangkat daerah yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Besar harapan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang menjadi kewenangan. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Liwa, Februari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



HENRY FAISAL, S.H., M.H.
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730912 199903 1 003